

**PARTISIPASI POLITIK GEREJA DI KEUSKUPAN BOGOR
DALAM PILKADA TAHUN 2018 (Studi Komunikasi Politik Gereja
Dalam Proses Demokrasi Di Kota Bogor)**

Andreas Bramantyo
Universitas Mercu Buana
ndrebram2702@gmail.com

Abstract. The Regional Head Election which held simultaneously in 2018 is a momentum of revival in the political of world. Catholics who are also part of Indonesian society must take part in it. Bogor Diocese is a particular church in relation to the Roman Catholic Church. Bogor is also one of the places where simultaneous regional elections are held. Therefore the Catholics in the Bogor Diocese region automatically participated in this regional election. However, there are concerns that arise from the Bogor Diocese on the apathy of the people in political participation due to a lack of understanding of the methods of political participation and the lack of information about politics. Departing from this problem, various information was explored in the study, both from the congregation and church leaders in the Bogor Diocese, and supplemented with literature on the political participation of the church in Bogor Diocese in the 2018 Regional Election. In exploring of this information, the theoretical foundation used to complete the research is democratic theory, groupthink theory, and dramaturgy theory. From the results of the research, it can be found that the church in the Bogor Diocese still invites people to be involved in political participation. The church must also call for and convey the information to the people in various ways. To convey the information, church leaders must have a political understanding so the people get an understanding that politics is not a taboo.

Keywords: Church, politics, communication, Bogor Diocese, participation

Abstrak. Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018 merupakan momentum kebangkitan dalam dunia politik. Umat Katolik yang juga merupakan bagian dalam masyarakat Indonesia harus mengambil bagian di dalamnya. Keuskupan Bogor merupakan Gereja partikular dalam relasi dengan Gereja Katolik Roma. Kota Bogor juga menjadi salah satu tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Dengan demikian, umat Katolik yang berada di wilayah Keuskupan Bogor secara otomatis ikut serta dalam Pilkada ini. Akan tetapi, ada kekhawatiran yang muncul dari Keuskupan Bogor terhadap apatisme umat dalam partisipasi politik yang disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap metode partisipasi politik dan minimnya informasi-informasi tentang politik. Berangkat dari persoalan ini, maka dalam penelitian digali berbagai informasi, baik dari umat ataupun dari pemimpin Gereja di Keuskupan Bogor, dan dilengkapi dengan literatur tentang partisipasi politik Gereja di Keuskupan Bogor dalam Pilkada 2018. Dalam menggali informasi tersebut landasan teori yang digunakan guna melengkapi penelitian adalah teori demokrasi, teori groupthink, dan teori dramaturgi. Dari hasil penelitian dapat ditemukan Gereja di Keuskupan Bogor tetap mengajak umat untuk terlibat dalam partisipasi politik. Gereja juga harus menyerukan dan menyampaikan informasi-informasi kepada umat melalui berbagai macam cara. Untuk menyampaikan informasi itu, pemimpin gereja harus memiliki pemahaman politik supaya umat mendapatkan satu pemahaman bahwa politik bukanlah hal yang tabu.

Kata Kunci: Gereja, politik, komunikasi, Keuskupan Bogor, partisipasi

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jatuh pada tahun 2018. Uniknyanya pemilihan ini diadakan secara serentak. Karena itu, atmosfer pada pemilihan kali ini seolah-olah menjadi stimulan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti. Tentu yang disoroti lebih pada Pilkada ini adalah bagaimana antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Semua berharap bahwa antusiasme masyarakat dalam pemilihan ini tinggi. Dengan terwujudnya harapan ini, berarti masyarakat Indonesia tidak anti terhadap hal-hal ‘berbau’ politik. Karena tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tidak mau tahu terhadap politik. Bahkan tidak sedikit pula yang anti terhadap hal tersebut. Bahwa masyarakat terus ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini terus-menerus menjadi harapan bersama. Kepedulian terhadap politik berarti juga kepedulian terhadap negara. Instansi-instansi atau lembaga-lembaga menjadi wadah untuk terus meneruskannya didengungkan partisipasi terhadap politik. Hal ini pun menjadi suatu perhatian yang lebih karena di sini yang berperan tidak hanya anggota dalam lembaga, instansi, atau kelompok tersebut. Akan tetapi, yang berperan di sini pun adalah pemimpin yang di dalamnya. Dengan kata lain peran penting itu pun dimiliki oleh seseorang yang mempunyai pengaruh besar di dalam kelompok tersebut. Keikutsertaan atau kepedulian pemimpin suatu lembaga, instansi, atau kelompok terhadap politik dapat memicu semangat partisipasi kepada anggotanya yang lain. Sebaliknya ketika mereka tidak lagi peduli terhadap politik, maka anggota yang masuk ke dalam instansi terkait pun akan tidak peduli.

Gereja, khususnya Gereja Katolik merupakan salah satu lembaga keagamaan di Indonesia. Gereja, dalam konteks ini adalah Gereja Katolik, tetap melihat politik sebagai sesuatu yang pada hakekatnya adalah baik, mutlak perlu bagi manusia, berpijak pada kemanusiaan untuk kebaikan umum “*bonum commune*” (Konferensi Wali Gereja, 2003). Maka menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai dengan hakekatnya, Gereja Katolik mengajak semua pihak untuk kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, setiap anggota Gereja perlu berperan aktif sebagai “*garam dan terang dunia*”, sesuai tugas tanggung jawab, situasi dan kemampuannya masing-masing, serta sesuai aturan yang berlaku. Dalam Matius 5 : 13 -16 dikatakan “Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga” (Deuterokanonika, 2003). Hal inilah yang mendasari Gereja Katolik dalam menyampaikan pandangannya kepada umat-umatnya.

Menjadi Garam dan Terang dalam politik adalah tugas semua orang Katolik. Dalam hal ini semua anggota Gereja Katolik dikelompokkan dalam tiga komponen, yaitu: kaum klerus, biarawan-biarawati dan kaum awam (Banjo, 2013). Semua komponen dapat dan perlu memainkan peranannya sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat atau negara dan serentak warga Gereja. Dengan demikian hal ini adalah sebuah panggilan bagi Gereja untuk terlibat dalam realita politik yang ada atau yang sedang dihadapi. Gereja Katolik ingin melibatkan diri dengan memikul tanggung jawab sejarah, membangun Indonesia yang lebih baik, lebih kokoh, yang sudah dibangun atas dasar darah dan pengorbanan. Namun, pertanyaannya sejauh apa Gereja sebagai Lembaga keagamaan dapat memasuki ranah Politik?

KAJIAN TEORI

Gereja Katolik, Gereja Nasional

Gereja Katolik amat dekat dengan istilah “Hierarkhi”. Keuskupan Bogor merupakan Gereja partikular dalam relasi dengan Gereja Katolik Roma yang dipimpin seorang Paus. Gereja Keuskupan Bogor memiliki kesatuan keimanan dan juga kepercayaan dengan Gereja Katolik Roma. Hierarkhi inilah yang menjadi kekhasan dalam Gereja Katolik, yang menunjukkan bahwa suara para pemimpin Gereja amat didengar oleh umat-umatnya. Suara para pemimpin Gereja memberikan arahan bagi para pengikutnya. Keuskupan atau dioses adalah bagian umat Katolik yang tinggal dalam suatu daerah dengan batas-batas tertentu, yang dipimpin oleh seorang Uskup. Keuskupan Bogor melingkupi dua propinsi, yakni propinsi Jawa Barat dan Banten. Jumlah umat di Keuskupan Bogor merupakan kelompok minoritas dan kebanyakan adalah pendatang atau bukan pribumi (Suriyanto, 2002). Kehadiran Gereja Katolik di tanah Sunda dan Banten sudah sejak lama bahkan sebelum zaman kemerdekaan. Dengan demikian Gereja telah menjadi bagian sejarah yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dikedua propinsi tersebut.

“*Ecclesia semper reformanda.*” Gereja senantiasa memperbaharui diri. Semboyan ini hendak membuktikan bahwa Gereja selalu terbuka terhadap pembaharuan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dalam perjalanan praktek berdemokrasi, Gereja memang pernah memasuki masa kelam dengan sistem teokrasi absolut. Namun pada akhir abad ke-19, Gereja kembali memperbaharui diri dengan memperhatikan prinsip-prinsip, nilai dan praktek demokrasi. Gerakan pembaharuan diri dari Gereja terlihat dari beberapa tulisan, dokumen, serta dekrit. Gereja tidak semata-mata mengurus hal yang bersifat kerohanian. Gereja turut mengajak umatnya untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, terutama dalam politik. Menurut dokumen *Gaudium et Spes*, Gereja tidak melepaskan diri dari tanggung jawab pada masyarakat di sekitar (Gaudium et Spes 73-76). Tanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya dunia yang beradab dan berkeadilan juga merupakan tanggung jawab dari Gereja (Apostolicam Actuositatem 4).

Keuskupan Bogor sebagai bagian dari Gereja Universal juga turut ambil bagian dalam kehidupan berdemokrasi. Namun kendati mengambil bagian dalam berdemokrasi, Gereja di Keuskupan Bogor diharapkan tetap berpegang pada prinsip dasar keterlibatan Gereja dalam politik. Prinsip dasar dalam menyampaikan pesan politik adalah mendidik umat ataupun Gereja sebagai institusi dengan beberapa cara, antara lain: menolak bantuan dari calon di masa kampanye dalam bentuk apa pun. Hal ini dilakukan supaya gereja tidak terperangkap dalam permainan politik praktis secara terselubung; Gereja tidak boleh memihak kepada salah satu calon. Artinya gereja harus menonjolkan eksistensinya sebagai lembaga yang netral dan menjunjung nilai-nilai ajaran Alkitabiah; Gereja tidak boleh terlibat dalam unsur politik. Tetapi Gereja mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan politik terhadap jemaat, agar memilih pemimpin yang berintegritas dan taat secara agama.

Khususnya dalam keterlibatan sosial politik Gereja yang diemban oleh Pemimpin Gereja, ternyata bahwa Pemimpin Gereja sebagai figur publik mau tidak mau akan memainkan juga suatu peranan politis (TIM FTK Wedabhakti, 2013). Dari satu pihak, Gereja selalu menolak suatu kepentingan dan kompetensi yang politis. Dari lain pihak, selalu dipertahankan bahwa demi kepentingan pewartaan dan berdasarkan kompetensinya yang moral (demi martabat manusia) Gereja sepantasnya menafsirkan keadaan politis dan menilai usaha-usaha. Lagipula, segala perhatian Gereja demi martabat manusia hanya dapat menjadi nyata dalam usaha-usaha ekonomi, sosial dan politik. Namun, dalam bidang sosial politik, tindakan harus dinilai tidak hanya menurut prinsip-prinsip moral umum, melainkan berdasarkan kebijaksanaan, yang menuntut keahlian dan pengetahuan kita. Dalam bidang

sosial politik, orang awam yang bersangkutan biasanya lebih ahli daripada para pemimpin Gereja. Masyarakat dan pemerintah serta kebanyakan umat Katolik memandang Pemimpin Gereja sebagai pemimpin umat, yaitu sebagai pemimpin informal yang dapat mengarahkan jemaatnya dan berpengaruh di masyarakat luas (Tjahjadi, 2012). Diakui dan diharapkan bahwa pemimpin Gereja memiliki kekuasaan moral serta ketahanan pribadi (bahkan lebih dari pejabat-pejabat politis), khususnya untuk memberantas kejahatan dan untuk mendukung serta meningkatkan moral umum dalam masyarakat (Wicaksana, 2014). Peranan sebagai pemimpin agama tidak mungkin ditolak dan oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa khususnya para pemimpin Gereja menjalin hubungan baik dengan para pejabat politis serta dengan pemimpin-pemimpin formal dan informal yang lain, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman politik kepada umat.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi kasus. Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Kata “Kasus” diambil dari kata “*Case*” yang menurut Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 3* (1989; 173), diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2). “*actual state of affairs; situation*”, dan 3). “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1). Contoh kejadian sesuatu, 2). Kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). Lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Karakteristik penelitian studi kasus pada umumnya sama dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu untuk menggali substansi mendasar di balik fakta yang terjadi di dunia (Pujileksono, 2015). Studi kasus merupakan salah satu dari sekian banyak metode pencarian kebenaran yang tentu saja hasilnya juga berupa kebenaran tentatif, yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Terlepas dari kekurangannya, Studi Kasus dianggap sebagai metode penelitian yang cukup menantang dan sangat tepat untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi dalam fenomena sosial dan budaya untuk selanjutnya diangkat ke permukaan sehingga menjadi pengetahuan publik.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini, teknik pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tiga cara, yaitu : Observasi partisipan, wawancara dan teknik analisis data. Dalam hal wawancara, ditemukan beberapa narasumber yang cukup kompeten, antara lain: Seorang Pastor, Umat yang aktif dalam dunia Politik dan beberapa narasumber lain yang juga berkarya sebagai pastor.

Informan Kunci (*Key Informan*)

1. Seorang Pastor
Beliau adalah Ketua Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Keuskupan Bogor dan terlibat aktif dalam beberapa kegiatan di Kotamadya Bogor. Antara lain: Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Badan Sosial Lintas Agama (Basolia).
2. Seorang Umat

Beliau adalah salah satu umat di Keuskupan Bogor yang aktif terlibat dalam kegiatan Kerasulan Awam (Kerawam) dan sebagai Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Keuskupan Bogor.

Narasumber (Informan)

3. Mgr. Paskalis Bruno Syukur

Beliau adalah Uskup Keuskupan Bogor. Uskup sebagai pimpinan tertinggi dari sebuah wilayah gerejani yang disebut Keuskupan. Sebagai pimpinan tertinggi tentunya gerak langkah menggereja akan ditentukan oleh beliau.

4. Pastor Ch.Tri Harsono, Pr.

Beliau adalah Vikaris Jenderal Keuskupan Bogor. Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Keuskupan Bogor.

5. Pastor Benyamin Sudarto, Pr.

Beliau adalah Moderator Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Keuskupan Bogor.

Wawancara di atas dikuatkan juga dengan studi literatur atau sering disebut studi pustaka sebagai data sekunder yang mendukung data primer digunakan untuk membantu memahami hasil wawancara dengan narasumber, mempertajam analisis penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, surat kabar, dan laporan-laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi komunikasi politik.

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian coba untuk diverifikasi. Penelitian dikatakan memiliki fungsi apabila hasil penelitian tersebut bisa dipertanggung jawabkan. Dengan menggunakan analisis data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian melalui langkah penelitian yang prosedural dan dapat dipertanggung jawabkan ke ranah ilmiahnya.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Untuk dapat mencapai cara yang paling benar dan absolut dalam sebuah penelitian, maka harus didasarkan pada sebuah teori dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, kearah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data meliputi wawancara mendalam dengan narasumber pokok, narasumber tambahan, pemilihan tema, sehingga sesuai dengan tujuan peneliti.
2. Organisasi data meliputi mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema melalui dokumen Keuskupan dan studi pustaka lainnya. Peneliti mengkategorikan informasi dalam kelompok yang lebih spesifik, lalu mendeskripsikan dan menjabarkan data tersebut secara kualitatif fakta yang ada di lapangan.
3. Interpretasi meliputi membuat kesimpulan sesuai dengan fakta dan data yang ada.

Dalam penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa penelitian benar-benar ilmiah perlu adanya keabsahan data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Untuk menentukan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan data. Terdapat beberapa teknik dalam pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang di gunakan oleh peneliti agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi adalah dengan melakukan triangulasi pada data yang diperoleh sehingga tercapai kredibilitas yang tinggi atas hasil penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk dibandingkan dengan data.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data yaitu “membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda (Bungin, 2011). Teknik ini bertujuan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data peneliti yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan konseptual yang dituangkan dalam tulisan ini melihat dari konsep komunikasi, partisipasi politik, komunikasi politik, pilkada dan demokrasi, serta Gereja sebagai Institusi Agama.

Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa transmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya (Supratiknya, 1995). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (KBBI, 1991).

Persoalan memahami komunikasi adalah bukan hal yang mudah, karena butuh kejelasan dari konsep komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memperjelas pemahaman tentang konsep komunikasi, seorang ahli yang bernama R.J. Wenburg mengemukakan bahwa: ”Setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi” (Mulyana, 2007). Pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah merupakan penyampaian pesan searah dari seseorang kepada seseorang lainnya, baik secara langsung maupun melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio atau televisi. Komunikasi cara ini lebih menekankan pada komunikasi yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan guna memenuhi kebutuhan pengirim, seperti menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau membujuknya untuk melakukan sesuatu.

Kedua, komunikasi sebagai interaksi seseorang yang telah menerima pesan dari pengirim bereaksi dengan memberikan jawaban baik verbal maupun non verbal, kemudian pengirim bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari penerima tadi, dan begitu seterusnya. *Feed back* yang diberikan dari penerima ke pengirim ini, akan menjadi petunjuk mengenai efektivitas pesan yang telah disampaikan, apakah dapat dimengerti, dapat diterima, ada kendala atau tidak dan sebagainya. Sehingga berdasarkan *feed back* tersebut, pengirim dapat mengubah pesan selanjutnya agar sesuai dengan tujuannya.

Ketiga, komunikasi sebagai transaksi lebih berorientasi pada penerima. Orang-orang yang berkomunikasi adalah pengirim-pengirim yang aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan, yaitu setiap pihak dianggap pengirim dan sekaligus juga penerima. Setiap berkomunikasi mereka saling bertukar pesan baik verbal maupun non verbal dengan cara memberikan respon pada setiap pesan yang disampaikan.

Hal ini pun menyangkut Partisipasi politik. Secara etimologi pengertian Partisipasi berasal dari bahasa latin yang berarti *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Syarifuddin, 1991). Sedangkan secara etimologi adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengambil bagian. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *Partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan

pemerintah (*public policy*) (Budiarto, 1982). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik (Sastroatmodjo, 1995).

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan (Ngelow, 2014). Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Dini, 2017).

Salah satu yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia mampu menerapkan komunikasi secara baik antar sesamanya (Tumanggong, 2017). Tujuan dari berkomunikasi pada dasarnya, untuk mengutarakan maksud seseorang kepada orang lain. Penting sekali kemudian menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan politik. Salah satunya memahami konteks berpolitik itu sendiri, dimana akan ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada konstituen dan itu memerlukan strategi komunikasi politik yang baik.

Komunikasi Politik : Cara Untuk Berpartisipasi

Komunikasi politik berasal dari dua kata dasar, komunikasi dan politik. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik dengan cara penggunaan media sebagai kemasan informasi atau melalui transmisi secara simbolik. Sehingga informasi mudah dimengerti dan pada akhirnya dimiliki kesamaan persepsi. Sedangkan politik adalah segala upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas wilayah kekuasaan.

Pilkada merupakan akronim dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan produk dari sistem pemerintahan demokratis. Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Kaitan antara pilkada dan demokrasi tercermin pada penghargaan terhadap suara atau aspirasi yang datang dari rakyat. Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini memiliki korelasi dengan

pembentukan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat. Pilkada langsung merupakan suatu rangkaian proses demokrasi pada tingkat daerah. Hal ini senada dengan perkataan seorang ahli, Robert Dahl dan dikutip oleh Affan Gaffar, bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik (Syaukani Gaffar, 2003). Pada tanggal 27 Juni 2018 akan diadakan pilkada serentak di beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan kebangkitan dari paham demokrasi di negara kita. Rakyat diharapkan untuk dapat terlibat dan juga berperan serta dalam memberikan suaranya. Dalam ajang pilkada ini juga nantinya akan dilihat sudah sejauh mana perkembangan ber-demokrasi di Indonesia.

Siapa Itu Gereja?

Kata “Gereja” bukanlah semacam batasan atau definisi. Ekklesia adalah kata yang biasa saja pada zaman para rasul (Syaukani Gaffar, 2017). Dari cara memakainya, kelihatan bagaimana jemaat perdana memahami diri dan merumuskan karya keselamatan Tuhan di antara mereka. Kadang-kadang mereka berkata “Gereja Allah” atau juga “jemaat Allah”, yang kiranya sesuai dengan cara berbicara orang Yahudi. Mereka menjadi “jemaat” atau “Gereja” karena iman mereka akan Yesus Kristus, khususnya akan wafat dan kebangkitan-Nya. Gereja adalah “jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus”. Maka sebetulnya ada tiga “nama” yang dipakai untuk Gereja dalam Perjanjian Baru: “Umat Allah”, “Tubuh Kristus”, dan “bait Roh Kudus”. Ketiga-tiganya berkaitan satu sama lain (Hartono, 2012).

Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus (Hartono, Dimensi Politik dari Sejarah Gereja, 2004). Ia lahir seiring kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus di dunia. Karena itu, apa yang disebut gereja perdana adalah persekutuan para murid Yesus dan ditambah dengan beberapa orang lain yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan menjadi saksi atas kebangkitan-Nya. Gereja perdana ini memiliki semangat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kuat, sehingga iman Kristen mulai tersebar dari Yerusalem, seluruh daerah Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia (Kis. 1:8) (Deuterokanonika, 2003). Salah seorang murid Yesus yang giat dalam pekabaran Injil ini adalah rasul Paulus. Ia mengabarkan Injil hampir di seluruh wilayah kekuasaan Romawi pada abad pertama, baik di kalangan orang-orang Yahudi diaspora maupun orang-orang bukan Yahudi. Selain rasul Paulus, para murid yang lain juga aktif mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Konon rasul Thomas mengabarkan Injil sampai ke India. Karena itu, pada akhir abad pertama dan memasuki abad kedua, sejumlah jemaat-jemaat Kristen lahir dan bertumbuh di seluruh wilayah kekuasaan Romawi, dengan latar belakang suku bangsa, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Namun demikian, jemaat-jemaat ini mengakui keesaan mereka di dalam iman kepada Yesus Kristus dan di dalam tugas panggilan mereka untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai jemaat-jemaat Kristen. Jadi, keesaan mereka pertama-tama terletak pada iman mereka kepada Yesus Kristus dan panggilan mereka untuk bersaksi di dalam dunia (Maryono, 2015).

Pendekatan Hubungan Gereja Dan Politik

Adapun landasan teori yang digunakan teori demokrasi, teori *groupthink*, dan teori dramaturgi. Ketiga teori ini yang menjadi tolak ukur untuk melihat dalam tulisan ini. Demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi mengejawantahkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya dan masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan (Beetham,

2000). Dengan kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu. William Ebenstein menyebutkan delapan ciri pokok demokrasi, yakni “empirisme rasional, penekanan pada individu, negara sebagai alat, kesukarelaan hukum di atas hukum, penekanan pada cara, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia dan persamaan asasi semua manusia” (Ebenstein, 1994). Henry B. Mayo lebih sederhana dengan menyatakan enam kriteria, yakni “menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara sukarela, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, adanya keanekaragaman dan tercapainya keadilan” (Mayo, 1965).

Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri. Prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran.

Groupthink adalah salah satu teori dalam komunikasi kelompok. *Groupthink* merupakan pemikiran kelompok yang muncul dari anggota kelompok yang berusaha keras untuk mencapai kata mufakat (adanya kebulatan suara) saat merumuskan satu keputusan di dalam kelompok. Gejala *groupthink* dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kehidupan berorganisasi. Gejala tersebut dapat berupa munculnya penilaian yang berlebihan, ketertutupan pikiran dan tekanan untuk mencapai keseragaman. *Groupthink* dapat diatasi diantaranya memberi kesempatan setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi dan mengembangkan sumberdaya untuk melakukan pengawasan dalam pembuatan kebijakan.

Hal ini kurang lebih dapat dikatakan mirip dengan yang terjadi dalam Gereja Katolik. Hierarki dalam Gereja Katolik membuat keputusan yang dikeluarkan oleh para pemimpin Gereja menjadi sebuah seruan dan acuan yang dituruti dan didengarkan dalam kalangan umatnya. Hal ini memang menimbulkan kesan negatif, namun demikian seruan yang dikeluarkan bukanlah seruan tendensius atau dalam ranah pilkada atau politik, tidak mengarah pada calon tertentu melainkan ke arah kebaikan dan *bonum commune*. Suatu kekhasan dalam tugas agama-agama dalam memberikan arahan normatif dan baik bagi para pengikutnya (Suharyo, 2013). Seruan dari Gereja ini juga bukan dikeluarkan berdasarkan pendapat sepihak melainkan berdasarkan dari hasil komunikasi dengan banyak elemen yang berkaitan dengan seruan yang akan disampaikan. Seruan dari Gereja ini difasilitasi oleh FMKI untuk dapat memberikan pandangan-pandangan terkait dunia perpolitikan secara spesifik. Semua ini dilakukan demi memberikan petunjuk dan arahan yang baik bagi para umat di kalangan akar rumput.

Cara mengatasi *groupthink* menurut Janis adalah pemimpin kelompok menangguk penilaian, mendorong munculnya berbagai kritik atas program atau keputusan yang diusulkan, mengundang ahli-ahli dari kelompok luar, menugaskan satu atau dua orang anggota untuk menjadi *devil's advocate* guna menentang pendapat mayoritas (sekalipun mereka sebenarnya setuju dengan pendapat itu), dan kelompok harus membuat keputusan-keputusan secara bertahap, tidak sekaligus. Hal ini yang harus diwaspadai oleh para pemimpin Gereja, sehingga mereka tidak boleh anti terhadap politik. Mereka harus dapat memberi saran-saran terkait *bonum commune* kepada para pengikutnya. Pendapat yang dikeluarkan oleh para pemimpin Gereja menjadi pegangan bagi FMKI untuk dapat memberikan informasi dan arahan politik yang baik bagi para umatnya.

Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Berdasarkan sejarah dari teori dramaturgi, pada tahun 1945 Kenneth Duva Burke (1897-1993) seorang teoritis literatur Amerika dan filosof memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. Tujuan Dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Dramatisme memperlihatkan bahasa sebagai model tindakan simbolik ketimbang model pengetahuan. Pandangan Burke adalah bahwa “hidup bukan seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama” (Macionis, 2006).

Istilah dramaturgi kental dengan pengaruh drama atau teater atau pertunjukan fiksi diatas panggung dimana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan (Macionis, Society The Basic, 2006). Dalam dramaturgi terdiri dari *Front stage* (panggung depan) dan *Back Stage* (panggung belakang). *Front Stage* (panggung depan) yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi penyaksi pertunjukan. Maksud dari panggung depan yaitu seseorang memainkan peran yang bukan asli di hadapan seseorang. *Front stage* dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *Setting* yaitu pemandangan fisik yang harus ada jika sang aktor memainkan perannya, dan kedua *Front Personal* yaitu berbagai macam perlengkapan sebagai pembahasa perasaan dari sang aktor. *Back stage* (panggung belakang) yaitu ruang dimana disitulah berjalan skenario pertunjukan oleh “tim” (masyarakat rahasia yang mengatur pementasan masing-masing aktor). Maksudnya yaitu yang dapat mengetahui kehidupan sosial sesungguhnya adalah dirinya sendiri bukan orang lain.

Dramaturgi hanya dapat berlaku di institusi total. Institusi total maksudnya adalah institusi yang memiliki karakter dihambakan oleh sebagian kehidupan atau keseluruhan (Risakotta, 2004). Kehidupan dari individual yang terkait dengan institusi tersebut, dimana individu ini berlaku sebagai sub-ordinat yang mana sangat tergantung kepada organisasi dan orang yang berwenang atasnya. Ciri-ciri institusi total antara lain dikendalikan oleh kekuasaan (hegemoni) dan memiliki hierarki yang jelas. Contohnya, sekolah asrama yang masih menganut paham pengajaran kuno (disiplin tinggi), kamp konsentrasi (barak militer), institusi pendidikan, penjara, pusat rehabilitasi (termasuk didalamnya rumah sakit jiwa, biara, institusi pemerintah, dan lainnya). Dramaturgi dianggap dapat berperan baik pada instansi-instansi yang menuntut pengabdian tinggi dan tidak menghendaki adanya “pemberontakan”. Karena di dalam institusi-institusi ini peran-peran sosial akan lebih mudah untuk diidentifikasi. Orang akan lebih memahami skenario semacam apa yang ingin dimainkan. Gereja hanya menyerukan suatu ideal yang harus ada dalam diri seorang pemimpin dan juga mengarah pada *bonum commune*, yang juga dalam prinsip demokrasi dilihat sebagai sebuah tujuan (Sasmita, 2007).

William Ebenstein menyebutkan delapan ciri pokok demokrasi, yakni “empirisme rasional, penekanan pada individu, negara sebagai alat, kesukarelaan hukum di atas hukum, penekanan pada cara, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia dan persamaan asasi semua manusia” (Ebenstein, Isme-Isme Dewasa Ini, 1994). Dari pernyataan Ebenstein diatas, kita dapat melihat salah satu ciri pokok demokrasi yakni musyawarah dan mufakat ada dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Sebagai contoh, mengenai hasil penentuan pilihan calon dan arah keputusan ke pasangan calon yang mana? Semuanya ada di tangan kelompok umat yang kompeten dalam bidang perpolitikan. Hasil yang keluar sebagai sebuah himbauan bagi seluruh umat merupakan hasil proses musyawarah dan mufakat dari berbagai pihak terkait kompetensi dan juga nilai-nilai yang diperjuangkan oleh

umat Katolik. Hasil yang berupa arahan untuk memilih ini nantinya akan mengarah pada terciptanya kesejahteraan bersama yang juga diperjuangkan dalam teori demokrasi.

Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Melalui wawancara didapatkan bahwa FMKI bergerak untuk mengumpulkan data-data valid terkait para pasangan calon sebagai pihak Katolik yang berpolitik. Hal ini dilakukan guna dapat melihat kriteria pemimpin yang benar-benar pro dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Gereja juga memperjuangkan hal itu, namun dalam ranah politik, Gereja tidak bisa terlibat terlalu dalam, namun Gereja juga tidak bisa pasif dengan berdiam diri. Gereja memainkan tugasnya dengan tetap menyuarakan kebenaran melalui seruan Gereja di mimbar. Secara spesifik, dipegang oleh FMKI dan umat beriman lainnya (Susanto, 2019).

Pada teori kedua yakni Teori *Groupthink* sebagai pisau analisis dalam membedah masalah Partisipasi Politik Gereja di Keuskupan Bogor sebagai kelompok yang juga memiliki kepentingan kebijakan dan arah yang ingin dicapai secara bersama atas kelompok (*group*), hal ini biasanya didasari oleh kepentingan bersama bagi semua umat yang dibina. Disini atas dasar perspektif komunikasi anggota yang ada dalam Keuskupan Bogor dapat dipastikan oleh narasumber, bahwa hal itu merupakan hasil keputusan bersama dari Uskup sebagai pimpinan tertinggi gereja di sebuah Keuskupan. *Groupthink* adalah salah satu teori dalam komunikasi kelompok. *Groupthink* merupakan pemikiran kelompok yang muncul dari anggota kelompok yang berusaha keras untuk mencapai kata mufakat (adanya kebulatan suara) saat merumuskan satu keputusan di dalam kelompok. Melalui hasil wawancara dengan para narasumber, didapatkan hasil yang sama dengan teori *Groupthink*, para pemimpin Gereja tidak menjalani peran sebagai pemikir tunggal terhadap keputusan akan pasangan calon yang akan dipilih, melainkan ada peran serta dari kelompok umat dan pendampingan dari Gereja untuk dapat mencapai kebulatan suara berdasarkan beberapa pertimbangan guna mendapatkan hasil pasangan calon mana yang akan dipilih. Dalam memutuskan ini tentu digunakan berbagai macam pertimbangan menyangkut kebaikan bersama.

Groupthink menurut Irvings Janis (1972) adalah “istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya, dan memiliki nilai moral” (Byrne, 2006). *Groupthink* terjadi manakala ada semacam konvergenitas pikiran, rasa, visi, dan nilai-nilai di dalam sebuah kelompok menjadi sebuah entitas kepentingan kelompok, dan orang-orang yang berada dalam kelompok itu dilihat tidak sebagai individu, tetapi sebagai representasi dari kelompoknya (Byrne, 2006). Apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan adalah kesepakatan satu kelompok. Tidak sedikit keputusan-keputusan yang dibuat secara *groupthink* itu yang berlawanan dengan hati nurani anggotanya, maupun orang lain di luarnya. Namun mengingat itu kepentingan kelompok, maka mau tidak mau semua anggota kelompok harus kompak mengikuti arah yang sama agar tercapai suatu kesepakatan bersama.

Walau teori *Groupthink* ini seringkali bernada negatif, dikarenakan adanya tendensi pembutaan kepentingan pribadi melainkan kepentingan golongan yang terikat dalam kebutuhan bersama, tetap saja dapat dilihat bahwa adanya keterlibatan dari anggota kelompok untuk mau mengenal dan mau mencapai apa yang menjadi tujuan bersama. Dalam wawancara terlihat bahwa teori *Groupthink* digunakan, yakni FMKI sebagai wadah dari peran serta umat dalam Gereja Katolik untuk dapat menyumbangkan ide dan pendapat mereka mengenai pasangan calon ditambah dengan penelitian yang valid. Segala saran ini dikumpulkan dan dipertimbangkan sehingga bisa menjadi satu suara yang dapat mewakili semangat dari Gereja Katolik sendiri (Wijaya, 2004). Peran politik praktis dijalankan oleh

FMKI dan umat beriman Katolik pada umumnya. Gereja hanya bertindak sebagai pihak yang netral dan lebih melihat secara keseluruhan.

Pada teori yang ketiga dalam penelitian ini, yang digunakan adalah Teori Dramaturgi. Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Tujuan Dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Dramatisme memperlihatkan bahasa sebagai model tindakan simbolik ketimbang model pengetahuan. Pandangan Burke adalah bahwa “hidup bukan seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama” (Macionis, Society the Basic, 2006).

Istilah Dramaturgi kental dengan pengaruh drama atau teater atau pertunjukan fiksi diatas panggung dimana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan. Dalam Dramaturgi terdiri dari *Front stage* (panggung depan) dan *Back Stage* (panggung belakang). *Front Stage* (panggung depan) yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi penyaksi pertunjukan. Maksud dari panggung depan yaitu seseorang memainkan peran yang bukan asli di hadapan seseorang. *Front stage* dibagi menjadi dua bagian.

Pertama, *Setting* yaitu pemandangan fisik yang harus ada jika sang aktor memainkan perannya, Dan kedua *Front Personal* yaitu berbagai macam perlengkapan sebagai pembahasa perasaan dari sang aktor. *Back stage* (panggung belakang) yaitu ruang dimana disitulah berjalan skenario pertunjukan oleh “tim” (masyarakat rahasia yang mengatur pementasan masing-masing aktor). Maksudnya yaitu yang dapat mengetahui kehidupan sosial sesungguhnya adalah dirinya sendiri bukan orang lain. Prinsip akan adanya *front stage* dan *back stage* juga didapatkan dalam hasil wawancara. *Back Stage* digambarkan dengan peran dari pimpinan Gereja untuk menyuarakan kebenaran dan kepedulian umat - umat terhadap pentingnya untuk terlibat dalam politik. Sedangkan gambaran dari *Front Stage*, diambil alih oleh FMKI yang didalamnya terdiri dari berbagai macam orang yang dapat memberikan ide dan saran, pertimbangan terkait pasangan calon dalam sebuah Pilkada. Kurang lebih dapat dikatakan, FMKI-lah yang bersentuhan langsung dengan politik, sebagai bagian dari *Front Stage*, FMKI-lah yang berlaku sebagai corong untuk memberi arahan bagi warga Katolik untuk dapat memilih pasangan calon tertentu.

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa teori dramaturgi berperan dalam hal ini. Gereja yang diwakili oleh para pemimpin Gereja dalam hal ini berperan sebagai *Back Stage*, memberikan pandangan-pandangan sesuai dengan kriteria dari ajaran Gereja, contoh integritas, kapabilitas, otoritas dan karitas untuk dapat menilai para pasangan calon. Sedangkan FMKI sebagai aktor utama di *Front Stage* untuk dapat menyeleksi para calon dan akhirnya menyuarakan kepada para umat untuk dapat memilih pasangan calon tertentu. FMKI-lah sebagai pihak yang menjalani politik praktis.

Hal ini memiliki kesamaan dengan yang dikatakan dalam teori dramaturgi terkait “*Breaking Character*” yakni kondisi sebelum berinteraksi dengan orang lain, seseorang pasti akan mempersiapkan perannya dulu, atau kesan yang ingin ditangkap oleh orang lain. Dengan konsep dramaturgis dan permainan peran yang dilakukan oleh manusia, terciptalah suasana-suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri (Purnomo, 2007). Tim FMKI sudah mencoba untuk menyeleksi para calon dilihat dari berbagai kriteria yang digunakan oleh Gereja sebagai tolak ukur pemimpin yang baik. Persiapan ini yang disebut juga dengan “*Breaking Character*” dalam teori Dramaturgi.

PENUTUP

FMKI sebagai media atau urat nadi bidang politik di Keuskupan Bogor hendaknya mampu menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan fungsinya, FMKI berperan untuk mencari informasi, mengolah informasi, dan menyampaikan informasi. Dalam mencari informasi diharapkan FMKI harus total untuk terjun langsung mencari informasi terhadap calon serta program supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam mengolah informasi FMKI harus bisa merumuskan dari mencari informasi supaya dalam menganalisa mencapai hasil yang akurat. Setelah mencari dan mengolah informasi, maka FMKI harus dapat menyampaikan hasil kepada para pemimpin Gereja dan umat. Dalam proses menyampaikan informasi inilah FMKI bisa untuk meyakinkan serta mendorong para pemimpin Gereja dan umat untuk pada akhirnya bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons Sebatu (ed.). *Diocese of Bogor In The Era of Globalization*. Bogor: Grafika Mardi Yuana. 2012
- Arifin, Zaenal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosdakarya. 2012
- Baron dan Byrne. *Social Psychology*. Pennsylvania: Pearson/Allyn & Bacon. 2006
- Beetham, David dan Kevin Boyle. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius. 2000
- Bertram Mayo, Henry. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press. 1965
- Budi Purnomo, Aloys. *Rakyat (bukan) Tumbal (Kekuasaan dan Kekerasan)*. Jakarta: Gramedia. 2007
- Budiarjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia. 1982
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2011
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 3b*. Flores: Arnoldus. 1974
- Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama RI. *Hirarki Gereja Katolik Di Indonesia*. Jakarta: Bimas Katolik. 2003
- Go, Piet. *Etos & Moralitas Politik: Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan*. Yogyakarta: Kanisius. 2004
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Kanisius. 1980
- Joseph Macionis, John. *Society the Basic*. New Jersey: Upper Saddle River. 2006
- K. Mills (ed.). *Human Rights Protection in Global Politic*. London: Springer. 2015
- Kassin, Saul dan Steven Fain. *Social Psychology*. United States: Cengage Learning. 2013
- Krippendorff, Klaus. *On Communicating : Otherness, Meaning and Information*. London: Routledge. 2010
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik*. Yogyakarta: Kanisius. 1996
- Konsili Vatikan II. "Dekrit Tentang Kerasulan Awam" (AA) dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, S.J. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993
- Konsili Vatikan II. "Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini" (GS) dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, S.J. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993
- Mas' oed, M. dan C. Mac Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2007

- Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007
- Nimmo, Dan. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Bandung: CV Remaja Karya. 1989
- Perloff, Richard. Political Communication. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum. 1998
- Pujileksono, Sugeng. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publishing. 2015
- Rudi, Dini (ed.). UUD 1945 & Perubahannya. Jakarta: Bmedia. 2017
- Sastroatmodjo, Sudijono. Perilaku Politik. Semarang: Ikip Semarang Press. 1995
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). Bandung: Alfabeta. 2008
- Suharyo, Ignatius. The Catholic Way. Yogyakarta: Kanisius. 2013
- Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Supratiknya, Augustinus. Komunikasi antar Pribadi. Yogyakarta : Kanisius. 1995
- Syaifuddin, A.. Kamus Pancasila. Yogyakarta: Nur Cahaya. 1997
- Syaukani, H.R. dan Afan Gaffar. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003
- Tjahjadi, Simon Lili. An Enduring Commitment. Yogyakarta : Kanisius. 2012
- Tumanggor, Rusmin. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Penerbit Kencana. 2017
- William Ebenstein dan Edwin Fogelman. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga. 1994
- Yin, Robert K. Studi Kasus : Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000
- Jurnal**
- Bernard Adeney Risakotta*. Interaksi Agama dan Politik dalam Sejarah Dunia Umumnya dan Indonesia Khususnya. *Jurnal Teologi GEMA Yogyakarta*. Vo. 59. Oktober 2004.
- Chris Hartono*. Dimensi Politik dari Sejarah Gereja. *Jurnal Teologi GEMA Yogyakarta*. Vo. 59. Oktober 2004.
- Elston Banjo*. Gereja (Agama) dan Politik. *Jurnal UNIERA Maluku*. Vol. 2. (2). Agustus 2013
- Herry Susanto*. Gereja Sebagai Umat Allah dan Rekan Negara. *Jurnal Jaffray Makassar*. Vol. 17. (1). April 2019
- Mungki. A. Sasmita*. Gereja dan Politik. *Asia Journal of Theology*. 2007
- Prasetya Handaya Wicaksana*. Keterlibatan Kaum Awam Katolik dalam Bidang Politik. Studi Kasus di Desa Banjarsari pada Tahun 2012-2013. *Jurnal Teologi Sanata Dharma Yogyakarta*. Vol. 03. (01). Mei 2014.
- Yahya Wijaya*. Memahami Teologi dan Politik. *Jurnal Teologi GEMA Yogyakarta*. Vo. 59. Oktober 2004.
- Yohanes. Maryono*. Keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam Bidang Politik. *Jurnal Teologi Sanata Dharma Yogyakarta*. Vol. 01. (02). November 2012.
- Zakaria J. Ngelow*. Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Jaffray Makassar*. Vol. 12. (2). Oktober 2014